Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)
ISSN (*online*) : 2581-2777 & ISSN (*print*) : 2581-2696

Analisis Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Daerah: Pengelolaan Terhadap Anggaran APBD Kota Yogyakarta

Mayada Putri Lalia[1] , Nathasya Aura Thirrany[2] , Revienda Anita Fitrie[3] , Eva Hany Fanida[4]

[1,2,3,4,]S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
Email: 25040674075@mhs.unesa.ac.id[1] , 25040674057@mhs.unesa.ac.id[2] , reviendafitrie@unesa.ac.id[3] , evafanida@unesa.ac.id[4]

ARTICLES INFORMATION

ABSTRACT

JURNAL SEKURITAS
(*Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi*)

Vol.9, No.3, Mei 2026
Halaman : 613 – 620

© LPPM & Prodi Manajemen UNVERSITAS PAMULANG

ISSN (*online*) : 2581-2777
ISSN (*print*) : 2581-2696

Keyword :
Quick ratio, Debt to Equity Ratio, Working Capital Turnover dan Pertumbuhan Laba

JEL. classification :
C33, G21, G24, N15, N25

Contact Author :

PRODI MANAJEMEN UNPAM
JL.Surya Kencana No.1
Pamulang Tangerang Selatan – Banten
Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491
Email :
sekuritas@unpam.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of performance-based budgeting in the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Yogyakarta City. The research uses a qualitative descriptive approach with a library research method, utilizing secondary data from regulations, official documents, and relevant literature. The findings indicate that performance-based budgeting has been administratively implemented through the integration of performance indicators into planning and budgeting documents. However, its substantive implementation remains not fully optimal, particularly in measuring outcomes and linking budget allocation to performance achievement. In addition, fiscal dependence on central government transfers and limited administrative capacity affect the effectiveness of APBD management. The study contributes to strengthening the understanding that performance-based budgeting requires not only formal compliance but also substantive evaluation to improve public financial management.*

Keywords: accountability; government performance; performance-based budgeting; public financial management; regional budget (APBD)

ISSN (*online*) : 2581-2777 & ISSN (*print*) : 2581-2696

A. PENDAHULUAN

Setelah Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah, tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disingkat APBD menjadi semakin besar. Tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien bagi masyarakat di daerah masing-masing. Dalam perjalanan otonomi daerah ini, muncul berbagai upaya reformasi di bidang anggaran, dan salah satu yang cukup menjanjikan adalah penerapan anggaran berbasis kinerja atau dalam bahasa Inggris disebut *performance-based budgeting* (Octariani et al., 2017).

Pendekatan anggaran berbasis kinerja ini memiliki prinsip utama yang berbeda dari cara-cara lama. Jika sebelumnya anggaran lebih fokus pada berapa banyak uang yang dibelanjakan dan kegiatan apa yang diselesaikan, maka anggaran berbasis kinerja menekankan pada hubungan yang jelas antara uang yang dihabiskan dengan hasil nyata yang dicapai. Dengan kata lain, setiap rupiah yang keluar dari kas daerah harus bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti bahwa uang tersebut secara nyata dapat memperlihatkan hasil positif di masyarakat. Metode ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi penggunaan uang rakyat, memastikan program-program pemerintah benar-benar bekerja sesuai rencana, dan memperkuat akuntabilitas para pejabat publik dalam mengelola keuangan daerah.

Keinginan untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mendorong penerapan sistem ini, mulai dari Undang-Undang Keuangan Negara hingga peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (Tangdiasik, 2020). Semua peraturan tersebut menegaskan bahwa penyusunan anggaran tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada tujuan yang jelas dan kinerja yang terukur. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma lama yang hanya menghitung realisasi keuangan dan pencapaian fisik sudah tidak memadai lagi. Saat ini, yang lebih penting adalah menunjukkan bagaimana anggaran yang dialokasikan benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Implementasi anggaran berbasis kinerja bukan sekadar pergantian nama atau prosedur administratif, tetapi membawa perubahan cara pandang yang lebih mendasar dalam pengelolaan keuangan publik (Ariwibawa et al., 2018). Ketika diterapkan dengan baik, anggaran berbasis kinerja dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk merencanakan program dengan target kinerja yang jelas, melaksanakannya sesuai rencana, serta mengevaluasi hasilnya secara berkala. Dengan cara ini, realisasi anggaran diharapkan lebih tepat sasaran dan dapat meminimalkan pemborosan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja yang konsisten berkaitan positif dengan peningkatan akuntabilitas, penyerapan anggaran, dan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan (Octariani et al., 2017).

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang telah mencoba menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja ini. Sebagai ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kota ini menghadapi karakteristik pembangunan yang cukup unik. Wilayahnya relatif kecil namun jumlah penduduknya padat, sehingga pengelolaan anggaran harus dilakukan secara cermat dan terarah. Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya memastikan bahwa setiap anggaran yang dikelola mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik maupun pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan (Lecture, 2016).

Meskipun demikian, penerapan anggaran berbasis kinerja tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah penetapan indikator kinerja yang tepat dan

dapat diukur secara objektif. Tidak semua program pemerintah memiliki indikator yang jelas, terutama program yang berdampak jangka panjang. Selain itu, keterkaitan antara input anggaran dengan output dan outcome program sering kali tidak bersifat linier, sehingga sulit untuk dievaluasi secara langsung. Tantangan lainnya adalah keterbatasan kapasitas administratif, baik dari segi sistem informasi maupun sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan pengukuran kinerja.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana implementasi penganggaran berbasis kinerja di Kota Yogyakarta, bagaimana pengaruhnya terhadap pengelolaan APBD, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penganggaran berbasis kinerja serta pengaruhnya terhadap pengelolaan APBD di Kota Yogyakarta, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan berbasis data mengenai sejauh mana penerapan anggaran berbasis kinerja mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan sistem penganggaran agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

B. KAJIAN LITERATUR

1. Teori Keuangan Publik

Keuangan publik membahas bagaimana pemerintah mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Musgrave, 1959). Dalam konteks pemerintah daerah, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen utama dalam menjalankan fungsi tersebut. Sejalan dengan konsep desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Mangonto, Siringoringo, & ..., 2023).

Kebijakan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan. Dengan demikian, APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik (*public policy instrument*) untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara optimal.

2. Teori Pay for Performance

Teori *pay for performance* (PFP) merupakan pendekatan dalam manajemen kinerja yang menekankan keterkaitan antara alokasi sumber daya (anggaran) dengan hasil atau kinerja yang dicapai (Lecture, 2016). Dalam sektor publik, konsep ini dikenal sebagai penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), yaitu sistem penganggaran yang tidak hanya berorientasi pada input, tetapi juga pada output dan outcome program.

Melalui pendekatan ini, setiap alokasi anggaran harus memiliki indikator kinerja yang jelas sehingga tingkat keberhasilannya dapat diukur secara objektif. Dengan demikian, pengalokasian anggaran didasarkan pada pencapaian kinerja tertentu, bukan semata-mata pada kebutuhan administratif. Dalam pengelolaan keuangan daerah, konsep ini tercermin dalam penyusunan APBD yang mengaitkan program dan kegiatan dengan target kinerja yang ingin dicapai, terutama pada sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, implementasi *pay for performance* dalam sektor publik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan indikator kinerja yang terukur, kapasitas sumber daya manusia, serta sistem evaluasi yang belum optimal. Oleh karena itu,

diperlukan penguatan dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran agar konsep ini dapat berjalan secara efektif.

3. Keterkaitan Teori dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Teori keuangan publik dan *pay for performance* memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Keuangan publik memberikan kerangka dasar mengenai bagaimana pemerintah memperoleh dan menggunakan sumber daya, sedangkan *pay for performance* memberikan pendekatan dalam memastikan bahwa penggunaan sumber daya tersebut menghasilkan kinerja yang optimal.

Kedua teori ini saling melengkapi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk mengelola anggaran secara transparan, tetapi juga harus mampu menunjukkan keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan capaian kinerja (Herda, 2013). Penerapan konsep ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Penelitian yang dipublikasikan dalam (Akuntabilitas et al., 2025) menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja lebih efektif dibandingkan pendekatan tradisional karena mampu menghubungkan antara penggunaan anggaran dengan hasil yang dicapai, meskipun implementasinya masih belum optimal di beberapa sektor .Selanjutnya, penelitian dalam (Rahmadani et al., 2026) menemukan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, namun masih menghadapi kendala pada aspek pengukuran kinerja dan sumber daya manusia.

Penelitian lain yang dipublikasikan dalam (Fahrevi et al., 2024)menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja memberikan dampak positif terhadap perencanaan anggaran pemerintah, meskipun masih terdapat kendala dalam koordinasi dan efektivitas implementasi di tingkat organisasi. Sementara itu, penelitian dalam (Tarigan, Sinaga, & Ginting, 2023) menunjukkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah telah berjalan cukup baik dan efisien, ditunjukkan dengan realisasi anggaran yang terkendali serta peningkatan belanja daerah dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja dapat mendorong pengelolaan APBD yang lebih efektif.

Selain itu, beberapa kajian penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan sistem berbasis kinerja memiliki hubungan dengan peningkatan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja secara umum berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, baik dari sisi efisiensi, akuntabilitas, maupun efektivitas. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan indikator kinerja, kapasitas sumber daya manusia, serta sistem evaluasi yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam konteks pemerintah daerah, khususnya pada pengelolaan APBD di Kota Yogyakarta.

C. METODOLOGI PENELITIAN

ISSN (*online*) : 2581-2777 & ISSN (*print*) : 2581-2696

Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif guna mengkaji implementasi penganggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Yogyakarta. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Sumber data meliputi regulasi perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen resmi APBD, laporan kinerja pemerintah daerah, serta literatur ilmiah berupa buku teks, artikel jurnal, dan publikasi kelembagaan yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu identifikasi dan seleksi literatur yang relevan, dokumentasi data, serta klasifikasi data berdasarkan kategori tematik yang sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data secara terstruktur, dan penarikan kesimpulan melalui komparasi antara konsep normatif penganggaran berbasis kinerja dengan praktik pengelolaan APBD di daerah.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari penganggaran berbasis kinerja sebagai variabel independen dan pengelolaan APBD sebagai variabel dependen. Pengukuran variabel penganggaran berbasis kinerja dilakukan melalui indikator keterkaitan antara input, output, dan outcome program, serta keberadaan indikator kinerja yang terukur. Sementara itu, pengelolaan APBD diukur melalui aspek efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang sistematis dan komprehensif mengenai penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka terhadap regulasi, dokumen perencanaan, serta laporan kinerja pemerintah daerah, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah mencakup tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD. Struktur APBD yang meliputi pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah disusun dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kebutuhan pelayanan publik.

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengaitkan indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan perangkat daerah. Alokasi anggaran dirumuskan dengan mempertimbangkan target output dan outcome yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara administratif, dokumen anggaran telah memuat komponen tujuan, sasaran, indikator kinerja, target capaian, serta rincian anggaran berbasis kegiatan. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa secara normatif sistem penganggaran di Kota Yogyakarta telah mengadopsi prinsip penganggaran berbasis kinerja.

Meskipun demikian, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja masih berada pada tingkat administratif dan belum sepenuhnya tercermin dalam aspek substantif. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara konsep normatif penganggaran berbasis kinerja dan praktik implementasinya. Temuan ini konsisten dengan penelitian Fahrevi et al., (2024) yang menyatakan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja sering kali bersifat formal, namun belum sepenuhnya menghasilkan outcome yang terukur secara optimal.

Dari aspek struktur keuangan daerah, hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komposisi tersebut menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang relatif terbatas. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tarigan et al., (2023) yang mengidentifikasi ketergantungan terhadap dana transfer sebagai salah satu karakteristik utama pengelolaan keuangan daerah.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keuangan daerah di Kota Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi, yang tercermin dari tingkat kepatuhan administratif dan realisasi anggaran. Aparatur pengelola keuangan daerah memiliki pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, meskipun dalam praktik masih terdapat kendala administratif dan teknis, khususnya dalam pengukuran indikator kinerja serta keterbatasan sistem evaluasi. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Rahmadani et al. (2026) yang mengidentifikasi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengukuran kinerja sebagai hambatan dalam implementasi penganggaran berbasis kinerja.

Pada tahap implementasi, terdapat indikasi ketidaksesuaian antara target kinerja dan realisasi program. Selain itu, indikator keberhasilan program cenderung diukur berdasarkan tingkat penyerapan anggaran dibandingkan dengan pencapaian outcome. Pola ini menunjukkan bahwa orientasi penganggaran belum sepenuhnya beralih dari pendekatan berbasis input menuju pendekatan berbasis hasil. Dalam perspektif teoritis, kondisi tersebut belum mencerminkan prinsip *pay for performance* yang menekankan keterkaitan antara alokasi anggaran dan capaian kinerja. Ditinjau dari aspek efektivitas dan efisiensi, realisasi anggaran di Kota Yogyakarta menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif tinggi. Namun, tingkat serapan anggaran belum sepenuhnya mencerminkan kualitas hasil program yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara belanja daerah dan capaian kesejahteraan publik masih memerlukan penguatan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur. Temuan ini mendukung penelitian Siregar dan Nasution (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas penganggaran berbasis kinerja tidak hanya ditentukan oleh tingkat serapan anggaran, tetapi juga oleh kualitas outcome yang dihasilkan.

Dari perspektif akuntabilitas dan *good governance*, pemerintah daerah telah menunjukkan upaya transparansi melalui publikasi dokumen anggaran dan laporan kinerja, serta melalui mekanisme pengawasan oleh DPRD dan lembaga pemeriksa eksternal. Dalam kerangka teori agensi, pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran kepada masyarakat sebagai prinsipal. Penganggaran berbasis kinerja berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi asimetri informasi serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penganggaran berbasis kinerja tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administratif, tetapi juga oleh kualitas implementasi pada aspek substantif, khususnya dalam pengukuran outcome dan evaluasi kinerja.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem evaluasi yang terintegrasi, serta peningkatan konsistensi antara perencanaan dan realisasi menjadi faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD.

Secara umum, pengelolaan APBD Kota Yogyakarta berbasis kinerja telah dilaksanakan pada tingkat struktural dan administratif. Namun, optimalisasi masih diperlukan pada aspek substantif agar orientasi penganggaran lebih menekankan pada capaian hasil yang terukur dalam mendukung pembangunan daerah.

E. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan APBD Kota Yogyakarta telah dilaksanakan secara struktural dan administratif melalui pengintegrasian indikator kinerja ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Setiap program dan kegiatan telah dikaitkan dengan target output dan outcome yang terukur, sehingga secara normatif mencerminkan penerapan prinsip *performance-based budgeting*. Namun, pada tataran implementatif, keterkaitan antara alokasi anggaran dan capaian kinerja belum sepenuhnya optimal, terutama dalam pengukuran outcome dan evaluasi kinerja yang masih terbatas. Selain itu, ketergantungan terhadap dana transfer pusat serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan sistem evaluasi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan APBD berbasis kinerja.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa keberhasilan penganggaran berbasis kinerja tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administratif, tetapi juga oleh kualitas implementasi substantif yang menekankan keterukuran outcome dan konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat integrasi antara teori keuangan publik dan *pay for performance* dalam menjelaskan pentingnya keterkaitan antara sumber daya dan hasil dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas aparatur, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur secara lebih terperinci hubungan antara alokasi anggaran dan capaian kinerja, serta memperluas objek penelitian pada berbagai daerah guna memperoleh perbandingan yang lebih komprehensif terkait implementasi penganggaran berbasis kinerja di tingkat pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Akuntabilitas, P. B. T., Khofi, M. Y., Pratama, I. N., Billah, Z. S., Ramadani, S., Syaputra, S. K., … Mataram, U. M. (2025). *Nusantara Hasana Journal*. *4*(9), 80–89.

Ariwibawa, Y., Rachmina, D., & Falatehan, A. F. (2018). *STRATEGI PENINGKATAN IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS*. *10*.

Fahrevi, M. R., Safitri, N., Ardhiansyah, A., & Akbar, M. B. (2024). *Media Ekonomi dan Bisnis Perkembangan Akuntabilitas Keuangan Di Sektor Publik Dalam Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Media Ekonomi dan Bisnis*. *1*, 7–14.

Herda. (2013). *No Title*. *2*(1), 1–17.

Lecture, P. (2016). *Pay For Performance and Beyond*. 413–442.

Mangonto, G. C., Siringoringo, P., & ... (2023). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja …. *Jurnal Hukum To-Ra …*, *9*(1), 149–160. Retrieved from https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/537%0Ahttps://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/download/537/254

Octariani, D., Daerah, P., & Sumbawa, K. (2017). *ANGGARAN BERBASIS KINERJA , SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS (Suatu Pengujian Struktural)*. *2*(2009), 27–41.

Rahmadani, A., Siahaan, R. N., Nst, N. A., & Dewi, P. K. (2026). *Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Perencanaan dan Pengendalian Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kota Medan*. *9*(1), 1451–1459.

Tangdiasik, Y. (2020). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura Sistim Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penganggaran Yang Berbasis Kinerja JURNAL EKONOMI & BISNIS Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura*. *11*, 39–45.

Tarigan, W. J., Sinaga, M. H., & Ginting, R. S. (2023). *BERBASIS KINERJA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEMATANGSIANTAR*. *5*(1), 9–20.